

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi telah menarik banyak perhatian beberapa tahun terakhir. Studi Helliwell (1994), Barro (1996), dan Guseh dan Oritsejafor (2005) menemukan bahwa demokrasi mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui pendidikan dan investasi. Kebebasan politik akan tumbuh jika pendidikan dan investasi memiliki kualitas yang baik. Adanya reformasi politik dan ekonomi memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja perekonomian suatu negara.

Demokrasi sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam tatanan pemerintahan. Pentingnya demokrasi dipandang memiliki beberapa manfaat yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu aturan pemerintahan yang mana setiap warga negaranya ikut terlibat dalam menjalankan negara serta mengontrol jalannya kekuasaan pemerintah. Didalam negara demokrasi, warga negaranya memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya. Masyarakat dapat mengontrol kinerja pemerintah dengan cara langsung melalui ruang publik dan juga melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat,

sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan rakyat, untuk kepentingan rakyat (Fuady, 2010).

Dalam negara yang menyebut sebagai negara berkedaulatan rakyat (negara demokrasi) seperti Indonesia, penerapan demokrasi perlu dilakukan dengan konsisten dan konsekuen. Negara yang menyelenggarakan sistem pemerintahan dengan pedoman demokrasi akan memberikan banyak sisi positif yang menguntungkan. Jika pemerintahan dan penyelenggaraan negara berjalan secara demokratis, maka kelangsungan hidup bangsa secara keseluruhan akan lebih adil,

beradab, dan bermartabat. Kepentingan masyarakat pun akan terjaga dan terlindungi serta rakyat terhindar dari penindasan.

Menurut Dahl (1989) suatu pemerintahan dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi apabila memenuhi 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, *effective participation* (partisipasi efektif). Adanya kesempatan yang sama dan adil bagi setiap warga untuk berpartisipasi.
2. Kedua, *voting equality at the decisive stage* (kesetaraan pilihan). Dalam negara demokrasi semua warga negaranya memiliki kedudukan yang sama apapun status sosialnya dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu misalnya, adanya jaminan penilaian setiap pilihan dihitung setara, yaitu satu orang satu suara satu nilai (*one man one vote one value*) apapun status sosialnya dalam masyarakat, semua dihitung setara.
3. Ketiga, *enlightened understanding* (pemahaman yang memadai). Dalam menentukan pilihan, setiap warga negara harus memahami calon/kandidat yang akan dipilihnya.
4. Keempat, *control of the agenda* (kontrol terhadap agenda). Adanya kesempatan yang sama bagi warga negara untuk mengawasi dan ikut berpartisipasi dalam masalah politik.
5. Kelima, *inclusiveness* (inklusif). Dalam penyelenggaraan pemerintahan serta politik mencakup keseluruhan warga negara tanpa terkecuali.

Proses demokratisasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998, ditandai dengan lengsernya era orde baru. Pada awal transisi era orde baru ke era reformasi,

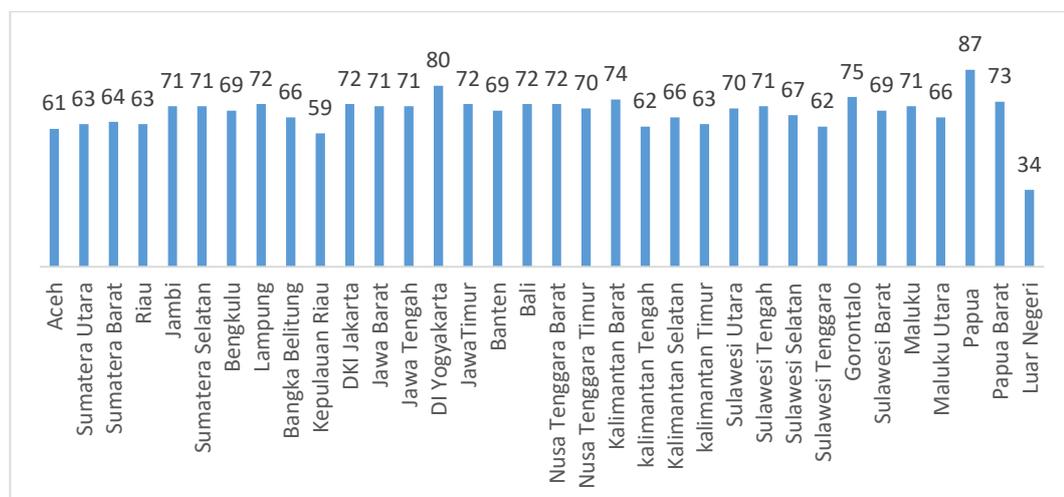
memberikan sebuah harapan akan adanya tatanan kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan munculnya banyak partai politik baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya yang merupakan ciri-ciri demokrasi mulai tumbuh (Purnaweni, 2004). Kebebasan berlembaga dijamin dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 dan 5 Tahun 1999 tentang partai politik dan otonomi daerah, undang-undang tersebut menjadi bukti bahwa proses demokratisasi telah berjalan.

Sistem pemerintahan yang *corrupt* serta tamak biasanya terjadi dalam negara yang tidak demokratis. Jika kehidupan yang demokratis tidak diterapkan dengan baik, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan HAM, serta tidak adanya persamaan di depan hukum. Demokrasi yang baik menghasilkan lembaga-lembaga pemerintahan yang baik pula (*good governance*) seperti: akuntabilitas pemerintah, stabilitas politik, peraturan yang berkualitas, pemerintahan yang efektif serta pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut berdampak positif terhadap tatanan kehidupan bangsa dan negara seperti, terwujudnya sistem pemerintahan yang prorakyat, terwujudnya pembangunan yang adil dan menyeluruh, terwujudnya bangsa dan negara yang maju, modern, dan unggul.

Stabilitas politik merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena keadaan politik yang stabil membuat pertumbuhan ekonomi yang stabil pula. Demokrasi menjadi tolok ukur stabil atau tidaknya keadaan politik suatu negara. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan sangat bergantung pada institusi politik dimana institusi politik akan menjadi indikator

keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Institusi politik berfungsi sebagai pengendali hak milik barang maupun jasa, membuat regulasi mengenai redistribusi secara merata serta sistem pemerintahan yang ditetapkan di negara demokrasi (Drazen, 2000).

Dalam konteks kehidupan politik demokrasi di Indonesia, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis (Purnaweni, 2004). Menurut Liando (2016), partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan oleh pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib pilih, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Berikut data tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden tahun 2014 per provinsi.



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (2014)

GAMBAR 1.1

Angka Partisipasi Pemilih pada Pilpres Tahun 2014

Menurut data KPU, tingkat partisipasi pemilih secara nasional pada pemilihan presiden 2014 sebesar 69,58 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan presiden 2009 sebesar 71,17 persen. Angka partisipasi tersebut juga meleset dari yang ditargetkan KPU sebesar 75 persen (*detiknews*, 2014). Dari gambar 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki angka partisipasi terendah diantara provinsi lainnya yaitu sebesar 59 persen. Sedangkan provinsi yang memiliki angka partisipasi pemilih tertinggi pada pilpres 2014 adalah Papua dan DI Yogyakarta sebesar 87 persen dan 80 persen.

Tingkat fluktuasi angka partisipasi politik dalam pemilu disebabkan oleh berbagai hal diantaranya, rakyat yang malas berpartisipasi karena menghambat aktivitas ekonomi mereka pada hari pemilihan, para calon pemilih merasa bahwa suara yang mereka berikan tidak mengubah nasib mereka atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, persoalan kesukuan juga menjadi salah satu penyebab ketidakaktifan rakyat dalam memberikan suaranya pada pemilu, serta berbagai masalah lain yang menyebabkan rakyat enggan memberikan suaranya dalam pemilu (Nurhasim *et al*, 2014). Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu diharapkan semakin *legitimate* pula kekuasaan tersebut dan begitu pula sebaliknya.

Demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi, demokrasi berperan penting dalam kinerja ekonomi yang saling mempengaruhi (Brata, 1999). Selain sumber daya manusia, pembentukan modal, dan teknologi,

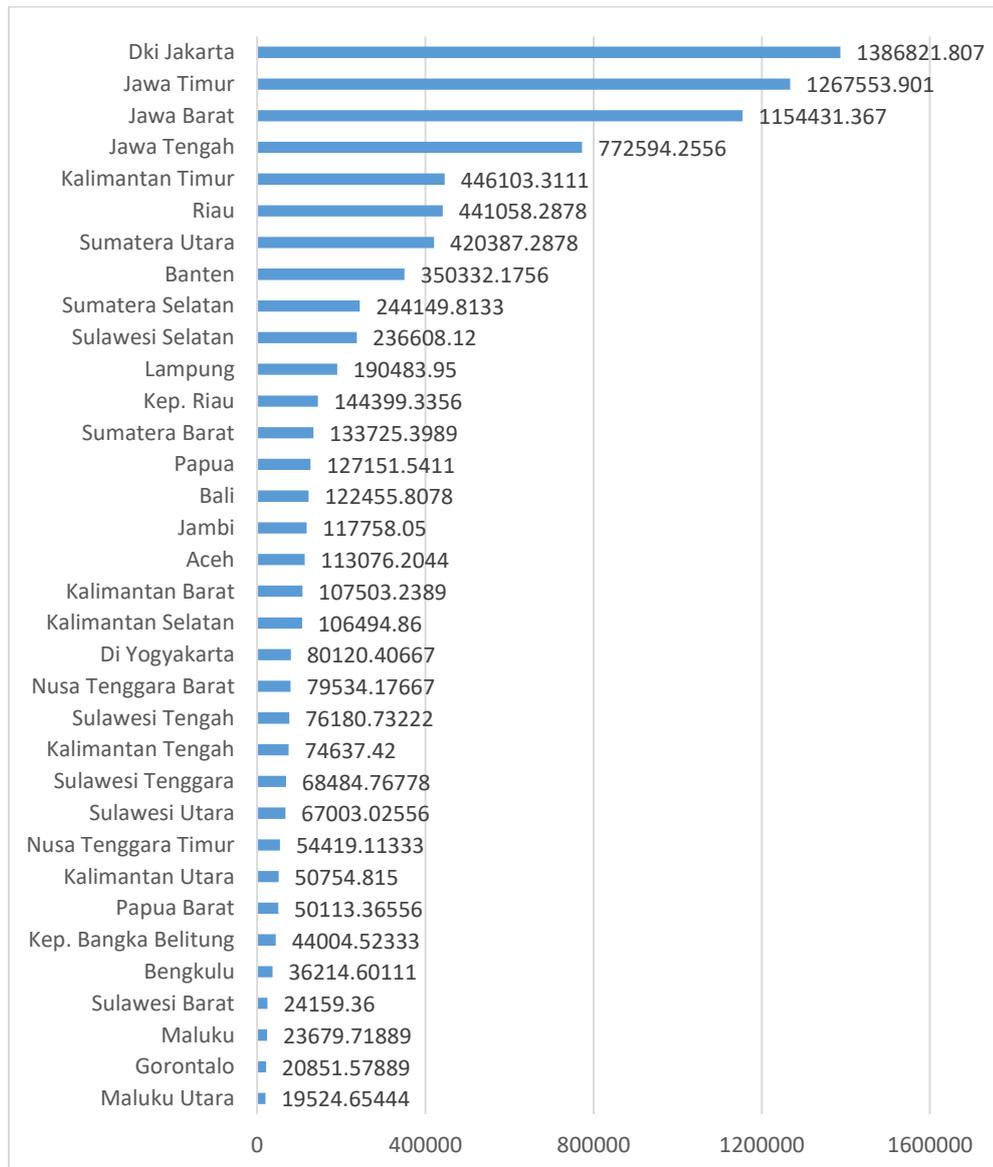
pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh demokrasi. Alokasi pembentukan modal tergantung pada lembaga-lembaga pemerintah serta keadaan politik yang demokratis karena produktivitas suatu negara terjadi ketika sistem kelembagaan yang baik.

Salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto merupakan hasil akhir dari jumlah produk maupun jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dalam suatu daerah selama periode tertentu. Stabilitas politik menjadi salah satu penentu bertumbuhnya ekonomi suatu daerah. Selain variabel ekonomi, faktor politik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu demokrasi. Studi mengenai dampak politik terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Aisen dan Veiga (2010) yang berjudul "*How Does Political Instability Affect Economic Growth?*" menyatakan bahwa ketidakstabilan politik mempengaruhi pertumbuhan dengan menurunkan tingkat pertumbuhan produktivitas, serta pada tingkat yang lebih kecil yaitu akumulasi fisik dan sumber daya manusia.

Penelitian lain dilakukan oleh Zouhaier (2012) yang meneliti tentang pengaruh hak politik, kebebasan sipil, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menjelaskan bahwa kebebasan sipil dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kebebasan politik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara parsial. Rahman (2011) menggunakan variabel akuntabilitas pemerintahan, stabilitas politik dan minimalisasi kekerasan, pemerintah yang efektif, peraturan yang berkualitas, dan pencegahan korupsi sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Stabilitas politik terjadi apabila keadaan demokrasi suatu negara sudah tercapai atau sudah demokratis. Pemerintah yang demokratis memiliki budaya politik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi (Leblang, 1996). Keadaan ini yang membuat masyarakat menjadi aktif sehingga dapat menyalurkan aspirasi kepada wakil rakyat yang terpilih. Kebebasan sipil, hak-hak politik dan kebebasan berlembaga menjadi aspek utama pembentuk indeks demokrasi sekaligus sebagai tolok ukur.

Di Indonesia pertumbuhan ekonomi setiap daerah berbeda, perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dikarenakan oleh beberapa faktor yang membuat cepat, lambatnya pembangunan disuatu daerah. Selain faktor teknologi, investasi, sumber daya manusia serta pendidikan, pertumbuhan ekonomi tergantung juga dengan keadaan stabilitas politik (Hdrule *and* Krigerl, 2015). Berikut data jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tahun 2018 provinsi yang ada di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018

GAMBAR 1.2.

Data Produk Regional Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018

Berdasarkan gambar 1.2 pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi di Indonesia menunjukkan angka yang beragam. Provinsi yang memiliki nilai PDRB atas harga konstan tahun 2018 tertinggi yaitu provinsi DKI Jakarta sebesar 1.386.821 miliar, sedangkan provinsi yang memiliki nilai PDRB

atas harga konstan tahun 2018 terendah yaitu provinsi Maluku Utara sebesar 19.524 miliar.

Di Indonesia demokrasi menjadi sangat penting karena adat, suku, ras dan bahasa setiap daerah berbeda. Oleh karena itu Badan Pusat Statistik merilis Indeks Demokrasi Indonesia sejak tahun 2009. Tingkat demokrasi di Indonesia tercermin dari tiga aspek pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia, tiga aspek tersebut yaitu aspek kebebasan sipil, kebebasan hak politik dan kebebasan berlembaga (BRS BPS, 2018).



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2009-2018

GAMBAR 1.3.

Perkembangan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009-2018

Berdasarkan gambar diatas, laju perkembangan aspek pembentuk demokrasi terlihat sangat fluktuatif. Jika dilihat dari aspek kebebasan sipil pada tahun 2009 yang tertinggi dari tahun 2009-2018 sebesar 86, 97% serta

perkembangan kebebasan sipil cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal serupa juga terjadi pada aspek kebebasan hak politik yang cenderung menurun, tahun 2015 merupakan tahun tertinggi pada indeks kebebasan hak politik sebesar 70,63 persen. Sementara untuk aspek kebebasan berlembaga tertinggi pada tahun 2014 sebesar 75,81 persen. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebanyak 43 persen responden merasa semakin takut berbicara mengenai politik (*vivanews*, 2019). Hal tersebut mengaskan bahwa indeks demokrasi Indonesia yang cenderung menurun dari tahun 2009-2018.

Menurut Fatah *et al* (2012) dalam penelitiannya *Economic Growth, Political Freedom and Human Development: China, Indonesia and Malaysia*, investasi asing langsung dan kebebasan sipil adalah faktor penentu utama pertumbuhan di Cina, sementara tingkat kesuburan yang tinggi dan keterbukaan yang lebih tinggi secara signifikan merangsang PDB di Indonesia, disisi lain Malaysia berkinerja baik dalam kebebasan politik dan kebebasan sipil dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dalam agama islam terdapat prinsip-prinsip demokrasi, antara lain tentang kebebasan berpendapat dalam musyawarah. Dalam surat Asy-Syura ayat 38 mengajarkan tentang musyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahan surat Asy-Syura:38: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada setiap muslim untuk selalu bertakwa kepada-Nya serta perintah untuk mendirikan sholat.

Selain itu Islam mengajarkan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggungjawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi bahan pertimbangan bersama. Dalam surat Asy-Syura ayat 38 juga terdapat perintah untuk menyisihkan sebagian harta untuk orang-orang yang kurang mampu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama umat-Nya.

Diantara tujuan syariah dalam ekonomi Islam yaitu terciptanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, adapun ayat yang menjelaskan ialah surat Al-Baqarah ayat 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan surat Al-Baqarah:30: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kedudukan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah Allah atau pengganti Allah, yang diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam, mengambil manfaat, serta mengelola kekayaan alamnya sehingga terwujud kedamaian dan kesejahteraan manusia yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu manusia wajib mengelola, merawat, dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan seluruh umat.

Menurut Todaro (2000) salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK). Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dimiliki diyakini akan menambah jumlah produksi, disisi lain meningkatnya pertumbuhan penduduk akan menguntungkan dalam segi pasar domestik yang semakin luas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja dibagi kedalam 2 kategori yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah tenaga tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang kegiatannya sekolah (mahasiswa, pelajar), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjaannya (Dumairy, 1996).

Pertumbuhan tenaga kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun yang menyebabkan tingginya angka pengangguran. Dengan demikian pentingnya meningkatkan jumlah lapangan kerja agar dapat menampung lebih banyak tenaga kerja sehingga daya produksi barang dan jasa akan meningkat secara signifikan serta pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat.

Menurut Lubis (2014), variabel jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pickett (1973) dalam penelitian *Population, Labour Force, and Economic Growth* menyimpulkan bahwa pertumbuhan populasi di Afrika memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan bertambahnya tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Afrika.

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh suatu wilayah seperti jalan, jembatan, pengairan/saluran irigasi, jalur kereta api, kelistrikan, telekomunikasi, serta bandar udara. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara merupakan faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (Todaro, 2006).

Menurut Ramadhan (2019), infrastruktur penggerak ekonomi dan infrastruktur pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap PDB per kapita. Oleh karena itu perlunya peningkatan infrastruktur publik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sahoo (2000) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa diantara semua sektor infrastruktur, listrik, gas, pasokan air dan sektor komunikasi memainkan peranan penting dalam pergerakan produk domestik bruto. Penelitian lainnya, Irawan dkk (2012) mengungkapkan bahwa perbaikan pada semua jenis

infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan pemerintah, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dengan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas penting dilakukan penelitian mengenai dampak aspek demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan variabel kontrol angkatan kerja dan infrastruktur.

A. Rumusan Masalah

Stabilitas politik sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, di Indonesia khususnya diberbagai daerah sangat beragam kualitas sumber daya manusianya, keadaan demokrasinya, maupun dari segi infrastruktur dalam upaya membangun sarana perekonomian. Dengan keberagaman keadaan politik dan ekonomi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang ingin diteliti sebagai berikut :

1. Apakah kebebasan sipil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2010-2018?
2. Apakah hak-hak politik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2010-2018?
3. Apakah kebebasan berlembaga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2010-2018?
4. Apakah demokrasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan adanya variabel kontrol angkatan kerja dan infrastruktur periode tahun 2010-2018?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebebasan sipil terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2010-2018?
2. Untuk mengetahui pengaruh hak-hak politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2010-2018?
3. Untuk mengetahui pengaruh kebebasan berlembaga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2010-2018?
4. Untuk mengetahui pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan adanya variabel kontrol angkatan kerja dan infrastruktur periode tahun 2010-2018?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Bagi pemerintah agar mampu menciptakan kebijakan yang membuat pertumbuhan ekonomi tinggi, salah satunya memperhatikan kebebasan sipil, hak-hak politik dan kebebasan berlembaga, serta dapat mengimbangi jumlah tenaga kerja dengan menyediakan lapangan kerja dengan cara menciptakan kondisi politik yang stabil guna memperoleh legitimasi para investor.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan dan mengevaluasi diri sendiri agar menjadi warga negara yang baik dan tidak menciptakan kegaduhan guna mencapai stabilitas politik.

3. Bagi pengembangan keilmuan, dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi untuk mengetahui pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian selanjutnya.